

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN ATAS JASA
PEMASANGAN KIJING PADA MAKAM**

(Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah (Muamalah)

Oleh :

Gema Hadi Syah Putra

NPM : 1621030307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGUPAHAN ATAS JASA
PEMASANGAN KIJING PADA MAKAM**

(Studi Kasus di TPU Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah (Muamalah)

Oleh :

Gema Hadi Syah Putra

NPM : 1621030307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam” (Studi Kasus TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)**. Agar memudahkan memahami dan supaya tidak adanya kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka akan dijelaskan kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana kata-kata tersebut adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah kegiatan mengumpulkan data,¹ serta ketetapan hukum terhadap kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²
2. Pengupahan atas jasa ialah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa yakni atas perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.³
3. Pemasangan kijing pada makam TPU Kelapa tiga adalah praktik usaha jasa pemasangan bangunan pada makam kepada seseorang yang telah meninggal dunia yang akan dikebumikan di TPU kelapa tiga.⁴

Berkenaan dengan penjelasan judul diatas dapat ditarik pemahaman bahwa **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing**

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.293

² Buvana Shalahin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-line), Tersedia di: <https://kbbi.web.id/jasa.html> (22 Juni 2019).

⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir*, h. 138-139

Pada Makam” (Studi Kasus TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung) upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana hukum tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam, karena memang bukan hal yang baru lagi di jumpai di kota Bandar Lampung untuk makam yang di bangun kijing.

B. Alasan Memilih Judul

Penulisan skripsi ini dibuat dengan beberapa alasan, yakni :

1. Secara Objektif

- a. Pada saat ini perihal permasalahan adanya makam yang di pasang kijing yang sebenarnya di zaman Rasullullah SAW tidak di perbolehkan namun pada tempat tinggal penulis khususnya Bandar Lampung bahkan bisa di katakan banyak yang makamnya di beri kijing, jarang ditemui makam yang tidak berkijing. Dari semua hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terdapat di dalamnya ;
- b. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam sangat dibutuhkan karena akan berakibat kepada sistem pengupahan atas jasa pemasangan kijing, karena sudah banyak di temui tempat jasa pembuatan kijing ini di bandar lampung atau daerah provinsi Lampung. Makam yang di pasang kijing kurang lebih 2 tahunan baru dapat di pasang dengan alasan tanah yang mungkin sudah tidak akan turun ke bawah lagi. Sehingga perlu adanya sebuah pembahasan lebih jauh terkait hal ini. Karena dalam pengupahan atas jasa pembuatan kijing itu pun berpengaruh apabila

kijing pada makam tidak di perbolehkan, maka bisa orang yang membuat kijing pada makam pun akhirnya menjadi salah. Di dalam judul ini terdapat konteks yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan alam suatu bangsa dan sebagainya seperti *iklim* atau *adat istiadat* yang ada pada suatu negara.

2. Secara Subjektif

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah.
- b. Dari aspek pembahasan, judul tersebut sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian dan serta didukung tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diarpakan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- c. Penelitian sebagai syarat memenuhi tugasakhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pemasangan Kijing pada makam bukan hal yang baru di daerah Bandar Lampung dimana tepat saya tinggal. Di setiap tempat kuburan atau makam pastilah banyak di temui makam-makam orang yang sudah meninggal dunia yang diberikan bangunan, ada pula yang di semen, ada pula yang di pagarkan dan lain sebagainya.

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman mempunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus menjawab semua permasalahan manusia yang telah dan yang akan timbul akibat kemajuan ilmu.⁵ Agar Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbarui.⁶

Sementara itu muamalah sendiri ialah aturan-aturan hukum Allah SWT, yang mengatur secara vertikal dan horizontal. Mengatur secara vertikal ialah hubungan manusia itu dengan sang penciptanya yaitu Allah SWT, berkaitan dengan ibadah. Sedangkan mengatur secara horizontal ialah hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri, karena sejatinya manusia itu ialah "*zoon politicon*" yaitu manusia yang suka bergaul dan selalu saling membutuhkan. Dalam hal ini mampu menjawab permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, agar dapat menetapkan hukum baru menggantikan hukum lama yang sudah tidak relevan bagi kemaslahatan manusia seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Adapun diantaranya yang termasuk muamalah itu sendiri yaitu jual beli, tukar menukar barang, pinjam meminjam, upah kerja dan lain sebagainya. Karena

⁵Mustafa & Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Malang: Sinar Grafika, 2009), h.59

⁶*Ibid*, h.59

⁷ Maimun, "*Hakikat Penolakan Imam Syafe'i Terhadap Istihsan dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*" (On-Line), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (16 September 2019).

muamalah sejatinya mengatur semua urusan baik duniawi, sosial kemasyarakatan dan akhirat.

Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS At- Taubah 105).⁸

Kegiatan transaksi salah satunya ialah sewe-menyewa yang di sebut ijarah. Namun ijarah disini bukan perihal pemanfaatan barang tetapi tenaga juga jasa dengan imbalan yang disebut upah.⁹ Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang diupah adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, dan ia harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Manusia bekerja karena ada motivasi dalam dirinya, dan motivasi tersebut mendorongnya untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena upah itu merupakan semangat dalam meningkatkan kinerja kerja.

Dalam Islam, upah dikenal sebagai ujah. Karena upah sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dan orang yang lainnya, yang termasuk dalam

⁸QS At- Taubah 105

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 115

¹⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta:Gema Imani Press, 2005), h.488

kategori akad yang dikenal sebagai Al-Ijarah. Oleh sebab itu dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ada didalamnya.¹¹ Dalam akad ijarah tentunya kedua belah pihak harus saling sepakat satu sama lain.

Terkait Upah Mengupah yang terjadi pada TPU Kelurahan Kelapa Tiga kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang melibatkan antara penyedia jasa dan pemakai jasa penyedia kijing pada makam pada garis besarnya, penulis menemukan beberapa permasalahan yang signifikan dalam memperkuat berkembangnya pemasangan kijing di Tpu Kelurahan Kelapa Tiga kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung diantaranya kijing telah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dalam berkehidupan masyarakat sehingga tradisi kijing selalu dipakai, pemasangan kijing pada makam juga berupaya merapikan makam yang ada pada tempat pemakaman umum yang dalam hal ini menuntut untuk kejelasan dalam kajian hukum Islam atas praktik pemasangan kijing yang telah membudaya semacam ini. Lalu permasalahan juga timbul ketika upah yang di berikan tidak sesuai dengan akad dan waktu pembayarannya pun tidak sesuai kesepakatan, dimana perjanjian di awal ketika kijing telah selesai dikerjakan pemakai jasa akan memberikan upah 400.000 namun pada kenyataannya ketika selesai hanya di bayar setengahnya yaitu 150.000 dan sisanya di 3 minggu setelah pembayaran pertama dilakukan. Permasalahan yang kedua sudah diberikan uang muka di awal yaitu 100.000

¹¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press, 2010), h.110

namun sisanya pun mengalami keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu yang telah disepakati.

Dasar hukum upah megupah itu sendiri tercantum dalam surat at-thalaq ayat 6 sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, perlu di adakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makamapakah sesuai dengan kaidah dan syariat islam atau belum.

Maka hal ini terlihat menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam memecahkan masalah tersebut melalui penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing Pada Makam”** yang berstudi kasus pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam dan kajian hukum Islam tentang sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

¹²A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 78

2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam di luar kesepakatan dan hukum membangun kijing pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam yang terdapat pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam yang terdapat pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengarahkan kajian skripsi ini pada kajian yang sistematis dan tepat, karenanya perlu adanya suatu perumusan tujuan yang tepat dan menjadi motivasi penulis dalam mengkaji permasalahan ini. Adapun tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam yang terdapat pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam yang terdapat pada TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis, dalam pandangan masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah sistem Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam. Dan juga supaya menjadi bahan untuk pengkajian selanjutnya agar mencapai pembahasan yang maksimal.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Jl. Tamin Gg. Hi Syafei, Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung tentang Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam yang tidak sesuai waktu pembayaran atau di luar kesepakatan yang semestinya, dan hukum membangun kijing pada makam.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹³ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang terjadinya Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam di luar kesepakatan yang semestinya.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁴ Metode deskriptif pada hakikatnya adalah

¹³ Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

mencari teori bukan untuk mengkaji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian sebagai amanat.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁵ Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung, dari pemakai jasa dan penyedia jasa di TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam tidak tepat waktu pembayarannya atau diluar kesepakatan yang semestinya.

4. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Penelitian dilakukan kepada semua elemen baik yang ada di wilayah penelitian hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di wilayah penelitian. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa

¹⁵Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPFE-VII, cet 4, (Yogyakarta:Persada, 1997),h.55.

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasi besar, dapat diambil 10-15% atau 15- 20% atau lebih.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁷ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari si pemakai jasa pemasang kijing dan si penyedia jasa yang diberi upah untuk di memasang kijing di TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Menjadi objek penelitian metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.108.

¹⁷ Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72.

demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁸Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya Pengupahan atas Jasa Pemasangan Kijing pada Makam tidak tepat waktu pembayarannya atau diluar kesepakatan dari yang semestinya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁹Dokumentasi ini dilakukan di TPU Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

¹⁸ *Ibid*, h.73.

¹⁹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.69

6. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif adalah metode Analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁰Amirullah, Zainal Abidin.,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pemasangan Kijing pada Makam Menurut Para Ulama

Pendapat para Imam Madzhab sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran masyarakat Indonesia. Para Ulama berbeda pendapat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengkijingan makam. Menurut Ulama Hanbali bahwa membangun di atas makam dan menulis diatasnya adalah makruh.²¹ Ulama Hanafi yaitu Imam Al-Kasani Al-khafiy turut memakruhkan tentang membangun di atas kubur berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَانِ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya : "Rasulullah SAW melarang melepai Kubur/Makam, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atas makam tersebut".²²

Disamping Hadits diatas, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa membangun di atas makam adalah hiasan dan hiasan tidak ada hubungannya dengan si mayit. Disamping itu membangun di atas makam adalah salah satu perbuatan yang membuang-buang uang. Atas alasan inilah Madzhab Hanafi memakruhkan membangun di atas makam.²³ Di

²¹ Ala'uddin Abu Hasan Ali bin Sulaiman, 1419 H: 549-550

²² Fachruddin, versi *Maktabah Syamillah* 3.5), Hadits No. 1610

²³ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasani Al-Hanafi, 2003: 359

sisi lain Madzhab Syafi'i membolehkan apabila tanah tersebut ialah milik pribadi namun Imam Syafi'i turut memkaruhkannya apabila tanah pemakaman tersebut milik umum.²⁴ Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ اللَّهَ الْيَهُودَ أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW. berkata: 'Allah melaknat Orang-orang Yahudidan Nasrani yang menjadikan Makam Nabi-nabi mereka menjadi masjid.'"

Dari pendapat para Imam Madzhab di atas memiliki Kesimpulan bahwa pembangunan di atas makam (pengkijingan) adalah Makruh secara umum, namun pemakruhan disini dalam kadar yang berbeda-beda. Sedangkan menurut imam syarbini al khotib dan Imam Al-Mawardi dalam kitab bujairomi di anjurkan :

وَأَيُّضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْلُومٍ صَخْرَةً وَقَالَ: أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَذْفَنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

Artinya : "Peletakan batu, kayu, atau benda serupa itu (dianjurkan) di atas makam pada bagian kepala jenazah karena Rasulullah SAW meletakkan batu besar di atas makam bagian kepala Utsman bin Mazhu'un. Rasulullah SAW bersabda ketika itu, "Dengan batu ini, aku menandai makam saudaraku agar

²⁴Muhammad az-zuhaili, *Al-Mu'tamad fiqih Imam Asy-Syafei'i*, (Jakarta: Gema Insani 2018), h. 154

*kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini”.*²⁵

Masalah dalam redaksi hadist agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini, menganjurkan peletakkan batu besar atau benda serupa itu. Masalah ini sudah jelas. “Tujuan peletakkan batu itu adalah penanda makam secara permanen di mana hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan batu besar. Imam Al-Mawardi menyebutkan anjuran peletakan batu di atas makam pada bagian kedua kaki jenazah.”²⁶ Tapi jika pemakaman tersebut bisa menghalangi orang lain untuk menggunakan tanah tersebut untuk menggunakan tanah pemakaman maka hukumnya adalah haram. Karena dianggap menghalangi pemanfaatan fasilitas umum dan itu dilarang oleh agama. Batasan boleh memanfaatkan tanah kuburan yang sudah digunakan untuk memakamkan jenazah adalah mayat yang ada di dalam kubur itu telah rusak. Yaitu sekitar 15 tahun hingga 70 tahun, perbedaan ini berdasarkan pada perbedaan iklim suatu daerah tertentu. Keterangan dalam kitab *Nihyatul Muhtaj* yaitu :

أَمَّا بَعْدَ الْبَلَاءِ عِنْدَ مَنْ مَرَّي مِنْ أَهْلِ الْحَبْرَةِ فَلَا يَحْرُمُ النَّبَشُ بَلَّ تَحْرُمُ أَمَّا رُتُهُ وَتَسْوِيَةُ تُرَابٍ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ لِإِمْتِنَاعِ النَّاسِ مِنَ الدَّفْنِ فِيهِ لِظَنِّهِمْ بِهِ عَدَمَ الْبَلَى

Artinya : “Adapun jenazah yang sudah hancur sesuai dengan perkiraan para ahli yang sudah berpengalaman tidak diharamkan untuk digali kembali, bahkan diharamkan untuk membangun bangunan dan meratakan (mengecor) tanah di atasnya jika berada di kuburan yang landai, karena itu bisa menghalangi orang lain untuk menguburkan (jenazah lain), karena mereka menyangka (jenazah yang pertama) belum hancur”.²⁷

²⁵ Kitab Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib alal Khatib, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1471 H) cetakan pertama, juz II halaman 571

²⁶ Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah :1996 M/1417 H) Cetakan pertama, juz II, halaman 571

²⁷ Syamsudin Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Mesir: Matba’ah Musthafa al-Halabi), 1357 H/1938 M), Jilid III, h. 40

أَمَّا بَعْدَ الْبَلَىٰ فَلَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ أَيُّ الْمَيِّتِ بَلَّ تَحْرُمُ عِمَّ رُثُهُ وَ تَسْوِيَةُ
الْتُرَابِ عَلَيْهِ لِأَنَّ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنَ الدَّفْنِ فِيهِ لِظَنِّهِمْ عَدَمَ الْبَلَىٰ

Artinya : “Sedangkan jenazah yang telah hancur maka tidak haram digali, bahkan yang diharamkan adalah membangun, meratakan (mengecor) tanah di atasnya agar tidak menghalangi orang lain menguburkan (jenazah lain) karena menyangka (jenazah yang semula) belum hancur”.²⁸

Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang bermayoritas bermadzhab Syafi'i.

Dalam hal ini, Pemerintah daerah telah mengupayakan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemakaman Jenazah. Di Bandar Lampung sendiri penulis belum menemukan atau mendapatkan peraturan yang membahas detail tentang ini, namun penulis menemukan Daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Penyelenggaraan dan retribusi pelayanan Pemakaman Jenazah adalah sebagai berikut:

1. Depok : Perda kota Depok Tahun 2012 No. 04
2. Tangerang : Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2012
3. Malang : Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2006
4. Pakpak Barat : Perda Kabupaten Pakpak barat No. 5 Tahun 2011
5. Semarang : Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2009
6. Kendal : Perda Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008
7. Jakarta : Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007

Peraturan-peraturan daerah tentang pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman tersebut telah mengalami beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkenaan

²⁸Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab, (Beirut: Maktabah Darul Fikr, 1422 H/2002 M), Juz I, h.118

dengan Daerah tersebut. Perda-perda tersebut tidak seluruhnya mengatur tentang pengijinan makam yang telah marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, Khususnya di Pulau Jawa. Bahkan hampir pada umumnya, masyarakat Indonesia belum mengetahui bagaimana memakamkan keluarganya yang telah meninggal.

Peraturan daerah adalah salah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Bupati/Walikota. Negara Indonesia adalah negara yang menganut *Asas Desentralisasi*. *Asas Desentralisasi* adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan-urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1974 (pasal 2) dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (pasal 3 (1)). Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Provinsi dan Ibukota Negara (pasal 27 (1)).

Provinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan (pasal 27 ayat 3). Apabila

dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan nya, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif (pasal 24 (4). Dalam Peraturan Daerah tersebut adalah salah satu upaya pemerintah menyelenggarakan pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.²⁹

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁰ Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

²⁹Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

³⁰Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008), h. 223.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, ijarah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan baru ditegakkan isinya.³¹

b. Dasar Hukum Akad

1) Al- Qur'an

a) Surat Al-Maidah ayat 1

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S Al-Maidah: 1).³²

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memenuhi Akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu pemakai jasa dan penyedia jasa harus memenuhi akad-akad agar ransaksinya menjadi sah.

b) Surat Al-Isra' Ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: ... Penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.³³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

c) Surat An-Nahl Ayat 91:

³²Q.S Al-Maidah: 1

³³Ibid, h.285.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۖ وَلَا تَنْقُضُوا أَلْأَيِّ مَنْ
بَعَدَ تَوَكُّدَ كَيْدِهَا وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksinya, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:³⁴

a) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)

Al-'aqidan adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut juga sebagai istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.46.

Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.³⁵

b) Pernyataan kehendak para pihak (*Ahigatul- 'aqad*)

Shighat al 'aqd ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengetian *ijab* dan *qabul*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).³⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al- 'aqd* ialah:

1. *Shighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya

Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "*Aku serahkan barang ini*", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan,

³⁵Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012, h.23.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima lafazh. Misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

3. Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.³⁷

2) Objek akad (*Al-Ma'qud alaihi*)

Ma'qud 'alaihi ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.³⁸

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 47-48.

³⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.58.

3) Tujuan akad (*Maudhu' al- 'aqad*)

Maudhu' al 'aqad ialah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Jadi motif transaksi bias berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual, atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.³⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Definisi ijab dan qabul menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

³⁹Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau menerima barang pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.⁴⁰

4) Syarat Akad

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.⁴¹

Berdasarkan unsur yang telah di bahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

a) Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

(1) Umum

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*....., h.45-46.

⁴¹Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), h. 9.

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

(2) Khusus

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*).

c) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- (3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam ujah adalah terhindarnya dari beberapa khiyar ijarah, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.⁴²

d. Macam-Macam Akad

Setelah di jelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yakni:

1) 'Aqad Munjiz

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat- syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

2) 'Aqad Mu'alaq

Ialah aqad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan

⁴²*Ibid*, h. 65-66.

penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

3) *'Aqad Mudhaf*

Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penaggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*

Yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu antara lain:

(1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad

Bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

(2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad

Misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan naib, wali pengantin laki- laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

(3) *Mu'wadlah* pada pelaku (isim musta'ar)

Ialah seorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara bathiniyah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).⁴³

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis- jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan antara lain:

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 51-52.

a) Akad Menurut Tujuan

(1) Akad Tabarru

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra’. Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

(2) Akad Tijari

Yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Isthna’ dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad Tijari (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for*

profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.⁴⁴

b) Akad Menurut Keabsahannya

(1) *Akad Shahih*

Adalah *aqad* yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam yaitu :

(a) *Aqad Nafiz*

Adalah *aqad* yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.

(b) *Aqad Mawquf*

Adalah *aqad* yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.78.

akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayyiz.

(2) *Aqad ghairu shahih*

Aqad ghairu shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam yaitu :

(a) *Aqad Bathil*

Akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek barang jasa itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(b) *Aqad Fasid*

Akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang

dimaksud.⁴⁵ Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli *Fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴⁶

e. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad ijarah misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, objek pembuatan barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

⁴⁵Abdullah al-Mushih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 35.

⁴⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108

- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadist Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas ijarah atau jasa yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).⁴⁷
- 5) Pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *gahir lazim* pada satu pihak dan *lazim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan

⁴⁷*Ibid*, h. 100.

orang yang menggadaikan barang. Pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya khiyar.

- 6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah jasa yang dilakukan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 7) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 8) Karena kematian.⁴⁸

3. Pengupahan

a. Pengertian Upah Mengupah

Di dalam islam sendiri upah dikenal dengan istilah ujah yang berarti upah. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaan kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.⁴⁹

Upah sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain tentunya, yang termasuk kedalam akad yang dikenal dengan istilah al-ijarah, baik yang bersifat materi maupun immateri. Oleh karena itu didalam melakukan akad upah mengupah perlu memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada didalam ijarah itu sendiri. Dalam ekonomi islam, jasa itu berkaitan dengan ijarah (Pengupahan). Oleh sebab itu penjualan

⁴⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*...., h.70.

⁴⁹Khumedi ja'far, *hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 141

jasa dalam islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan barang, ataupun jasa yang dihasilkan melalui tenaga manusia.⁵⁰

Secara bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), al ijarah mengandung beberapa makna atau pengertian dari beberapa pendapat anantara lain:

1. Menurut Syaik Al-Din dan Syaikh Umairah, Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
2. Menurut Ulama Hanafiyah, Al Ijarah ialah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
3. Menurut Ulama Maliki dan Hambali, Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵¹
4. Menurut Al-Syarbini, Ijarah adalah Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.

⁵⁰ Idri, hadis ekonomi (ekonomi dalam perspektif hadist nabi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 231.

⁵¹ Gemala Dewi, et al, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 112.

5. Menurut Hasbi Ash-Shaddiqie, Ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

b. Dasar Hukum Upah Mengupah

Ulama bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan, karena hukum asal upah mengupah ialah mubah (boleh). Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma.⁵² Pastinya sudah banyak sekali yang membahas perihal aturan untuk melakukan upah mengupah ini, beberapa yang membahas perihal pngupahan ini antara lain:

- 1) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam Al-Qur'an adalah :

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

الرَّضَاعَةُ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَلَدَاتِ
إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى
الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلَدِهَا وَلِدَةُ تُضَارَّ لَا وَسَعَهَا
جُنَاحَ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ
إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَدَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا

⁵² Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: rajawali pers,2016.) hal. 102.

تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ ءَاتِيَتْكُمْ مَا سَلَّمْتُمْ

بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".⁵³

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Qashas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashas 26-27).

2) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam as-sunnah ada beberapa riwayat

antara lain:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁵³ Ibid hal. 103

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.(HR. Ibnu Majah).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Hadis riwayat Abu Hurairah:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ

Artinya: “Allah SWT berfirman, Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) memakan keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya.”⁵⁴

3) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam ijma’

Sementara dasar hukum Upah Mengupah dalam al-ijma’ ialah :

“Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bi Waqash), dikarenakan Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang

⁵⁴ Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: rajawali pers,2016.) h. 104.

atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat Pengupahan

Agar transaksi upah-mengupah dan sewa-menyewa menjadi sah, maka haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hassanudin Dari "Fiqhus Sunnah"*. Jilid IV, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006), h.18.

⁵⁶ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.117

2. Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: 'Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00" maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Sementara ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan mengerjakan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun yang menjadi rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz ijarah atau isti'jar. Mendekati apa yang sudah dipaparkan diatas jumhur ulama pun membagi 3 rukun ijarah ini antara lain:

- 1) Aqidan yang terdiri dari mu'ajir dan musta'jir
- 2) Sighat yang terdiri dari ijab dan kabul
- 3) Ma'qud'alaih yang terdiri dari ujah dan manfaatnya.

Sementara itu syarat-syarat akad ijarah antara lain:

- 1) Syarat terjadinya akad (Syarat al-in'iqad)
 - a) Syarat untuk pelaku yang berakad (*al-muta'qidain*). adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'iyah dan Hanabiah). Dengan demikian, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka (sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *al-ijarah*-nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa kedua orang yang berakad boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz*, dan tidak berakal.

b) *'An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri.

Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.⁵⁷ sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa'(4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

2) Syarat Sahnya Akad (syarat *ash-shihhah*)

a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu. Maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4): 29.

b) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan

⁵⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, h. 132.

berapa lama manfaat di tangan penyewa.⁵⁸ Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijarah*, seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.⁵⁹

- c) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Atau dengan kata lain tidak sedang digunakan atau disewakan dengan orang lain.⁶⁰
- d) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.⁶¹
- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Maka bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban menyewa jasa

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II..., h. 232.

⁵⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 186.

⁶⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II..., h. 232.

⁶¹*Ibid*, h. 231-233.

seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.⁶² Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

- f) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu tidak boelh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.⁶³

3) Syarat-syarat upah (*ujrah*)

- a) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidka boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

- b) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (*ma'qud 'alaih*). Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *ijarah* seperti ini dibolehkan.⁶⁴

⁶²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 108.

⁶³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II...., h. 232.

⁶⁴*Ibid*, h. 231-235.

d. Macam-macam Upah Mengupah

Ijarah terdapat 2 macam yaitu:⁶⁵

- a. Ijarah atas manfaat bisa disebut juga dengan sewa- menyewa dalam Ijarah bagian ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan upah- mengupah.

Dalam Ijarah bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan bagi seseorang. Pendapat lainnya mengemukakan atau mendefinisikan kata Ujrah berasal dari kata al- ajru yang berarti al-tawadlu (ganti). Dengan sendirinya lafadz al- tsawab (pahala), merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.⁶⁶

Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁶⁷

Kompensasi imbalan adalah yang kemudian disebutkan dengan kata Ujrah , arjun, yang diartikan dan dikaitkan dalam ayat Al- Quran Surat At- Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

⁶⁵ Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah*, (jakarta: Amzah, 2010),h.392

⁶⁶ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki (Bandung: alMa`ruf)h.15

⁶⁷ Taqyudin an- Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (surabaya: Risalah Gusti, 1996).h.83.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶⁸

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang Ajir boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti ayat yang telah disebutkan diatas.⁶⁹

e. Waktu Pembayaran Upah

Waktu mengenai poembayaran upah itu tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upah sebenarnya bisa dibayarkan sebelum pekerjaan itu selesai.⁷⁰ Sebagaimana sabda Nabi SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya. alasan yang dibenarkan.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.558

⁶⁹ H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya1991).h,85

⁷⁰ Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2016), h. 143

Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

f. Penentuan Tarif Upah

Menurut Ibnu Tamiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.⁷¹ Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Tamiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-'amal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan,

⁷¹R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.175

setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.⁷²

g. Perbedaan Tingkat Upah

Perbedaan tingkat upah dapat dilihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu⁷³ :

1. Perbedaan jenis pekerjaan
2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan
4. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerja. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya bukan perbedaan jerih payah tenaganya, meskipun jasa dalam suatu pekerjaan itu semata merupakan hasil dari tenaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an An-nisa 32 yaitu :

⁷²*Ibid.*,h.176

⁷³ Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* , (Jakarta: LPFE UI, 1998),h.38

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya : dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut bahwa penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan dan profesionalisme dan pendekatan Al-Qur'an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan perdaban manusia.⁷⁵

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Pendapat Ibnu Tamiyah bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikiranya menghubungkan antara tingkat upah yang setara sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat

⁷⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta:Media Insani Publishing, 2007), h.132

⁷⁵M.A Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000), h.118

disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tentang upah antara kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁷⁶

h. Manfaat dan Hikmah Upah Mengupah

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia, begitupun dalam bertransaksi atau dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia haruslah jelas manfaat serta ikhwah yang tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi objek Ijarah haruslah diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.⁷⁷

a. Menurut para ulama manfaat Ijarah ada lima yaitu:⁷⁸

- 1) Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, yang meliputi:
- 2) Barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat Islam).

⁷⁶*Ibid.*,h.120

⁷⁷ Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h .95

⁷⁸*Ibid.*h. 96

- 3) Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan.
- 4) Benda objek sewa harus diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda yang hilang atau jika pengupahan bekerja yang diberikan adalah pekerjaan yang mampu dikerjakan.
- 5) Benda yang disewakan kekal zat nya sehingga dapat di tetukan tempo sewanya.

i. Sistem Pengupahan

Pengupahan dapat dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar. Disamping itu sistem pengupahan haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.⁷⁹

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a). upah minimum;
- b). upah kerja lembur;
- c). upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

⁷⁹ M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan" (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/search/search?simpleQuery=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Upah+Pembajak+Sawah+di+Desa+Klesem+Pacitan&searchField=query>

- d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f). bentuk dan cara pembayaran upah
- g). denda dan potongan upah;
- h). hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i). struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j). upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k). upah untuk perhitungan pajak penghasilan.⁸⁰

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji,

⁸⁰ Undang-undang nomor 13 tahun 2013, :”Ketenagakerjaan”, Presiden Republik Indonesia : (Jakarta)

kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka

harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta prinsip-prinsip memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan atau pemberi pekerjaan.

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan salah satunya ialah Keadilan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “economic security” beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.



B. Tinjauan Pustaka

1. Nur Rofiqoh, (2015), 11111231, Nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi Membangun kijing (Studi Deskriptif Di Dusun Siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang), yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi membangun kijing pada makam, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang pengupahan atas jasa pembangunan kijing pada makam. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.⁸¹
2. Miftah Rahmatullah, (2011), 103043127962, Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi komparatif antara TPU pondok Gede dan TPU pondok Rangun), yang dalam penelitiannya mencakup tentang penegasan terkait bisnis pemakaman dalam perspektif islam, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang pengupahan atas jasa pembangunan kijing pada makam. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.⁸²
3. Arthur Rachaman, (2016), Pembangunan Kijing Makam di Kendal dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Daerah, yang dalam

⁸¹Nur Rofiqoh, 11111231, "Nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi membangun kijing Studi Deskriptif di dusun siwal desa siwal kecamatan kaliwungu kabupaten Semarang". Diakses dari <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/203/> pada Minggu, 14 Juni 2020.

⁸²Miftah Rahmatullah, 103043127962, "Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam". Diakses dari : <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3951/1/MIFTAH20RAHMATULLAH-FSH.pdf> pada Minggu, 14 Juni 2020.

penelitiannya tentang penegasan terkait hukum pembangunan kijing di korelasikan dengan peraturan daerah setempat, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang pengupahan atas jasa pembangunan kijing pada makam. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.⁸³

4. Dedi Mahyudi, (2014), 91212012487, Pandangan Teologi Islam tentang tradisi ngijing pada upacara selamatan Nyewu di Kabupaten Deli Serdang yang dalam penelitiannya tentang penegasan terkait tradisi membangun kijing pada makam sekaligus upacara selamatan yang sudah menjadi tradisi di desa setempat, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang pengupahan atas jasa pemasangan kijing pada makam. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.⁸⁴

⁸³Arthur Rachaman, "Pembangunan Kijing Makam di Kendal dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Daerah" diakses dari : http://digilib.uinsgd.ac.id/27584/1/1_COVER.pdf pada Minggu, 14 Juni 2020.

⁸⁴Dedi Mahyudi, " Pandangan Teologi Islam Tentang Tradisi Ngijing pada Upacara Selamatan Nyewu di Kabupaten Deli Serdang" diakses dari : http://repository.uinsu.ac.id/1708/1/Dedi_wahyudi.pdf pada Minggu, 14 Juni 2020.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

RI, Departemen. Agama. (2013). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.

2. Buku

Sya'roni, Usman. 2008. *Ensiklopedia Imam Syafe'i*. Jakarta Selatan : Mizan Publika.

Az-Zuhaili M. 2018. *Al – Mu'tamad Fiqih Imam Asy Syafe'i*. Jakarta : Gema Insani

Muchtar Achmad. 2014. *Fatwa – Fatwa Imam Syafe'i*. Jakarta : Imprint Bumi Aksara

Syaikhul Islam Zakariya, 1422H/2002M. *Fathul Wahab*, (Beirut : Maktabah Darul Fikr)

Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Depok : Gema Insani

Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.

Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ja'far, K. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.

Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djamal, Abdoel., 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman dan Ihsan, Ghufroon dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.

J Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana.
- Soekamto, Soerjono. 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: NurCahaya.
- Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardi Muslich, Achmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Hamzah Yu'kub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV diponegoro.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idris Ahmad. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka.
- Ahmad Wardi Muslich. 2007. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 85-86.
- Wahbah Az-zuhaili. 2011. *al-Fiqih al-islami Waadilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo Adisasmita. 2004. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti Adji Adisasmita. 2013. *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Maksum dan Hasan Ali. 2015. *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada.

3. Jurnal

- Maimun, "Hakikat Penolakan Imam Syafe'i Terhadap Istihsan dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam" (On-Line), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (16 September 2019).
- Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (21 September 2019).

4. Wawancara

Bapak Dendi, wawancara dengan penulis, Jl. Tamin Gg.Hi Syafei, Bandar Lampung, 5 Oktober 2020.

Bapak Adang, wawancara dengan penulis, TPU Kelapa Tiga, Bandar Lampung, 5 Oktober 2020.

Bapak Anto, wawancara dengan penulis, TPU Kelapa Tiga, Bandar Lampung, 5 Oktober 2020.

Bapak Adi, wawancara dengan penulis, Jl. Tamin Gg.Hi Syafei, Bandar Lampung, 6 Oktober 2020.

Bapak Hendra, wawancara dengan penulis, TPU Kelapa Tiga, Bandar Lampung, 6 Oktober 2020.

Bapak Handoko, wawancara dengan penulis, TPU Kelapa Tiga, Bandar Lampung, 6 Oktober 2020.

Bapak Eko, wawancara dengan penulis, Jl. Abdurrahman, Bandar Lampung, 7 Oktober 2020.

Bapak Andre, wawancara dengan penulis, TPU Kelapa Tiga, Bandar Lampung, 7 Oktober 2020.

Bapak Gunawan, wawancara dengan penulis, Jl. Hi. Agus Salim, Lampung, 7 Oktober 2020.

Bapak Damsi, wawancara dengan penulis, Jl. Tamin Gg.Hi Syafei, Bandar Lampung, 7 Oktober 2020.

5. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. *Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.